

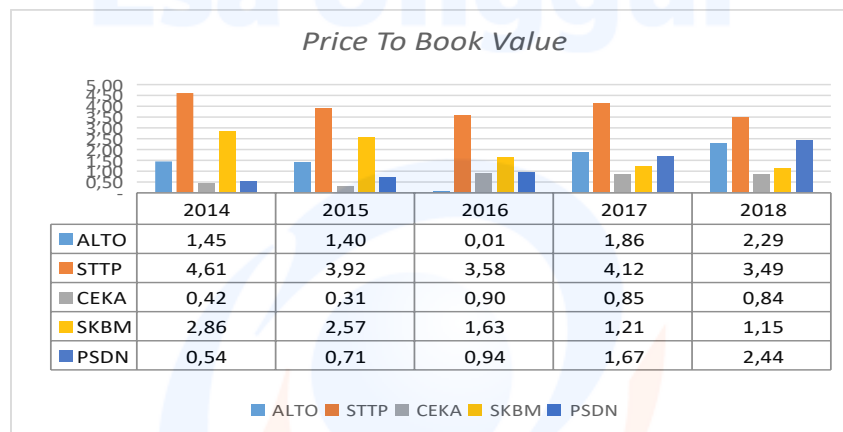
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, *volume* kebutuhan terhadap makanan dan minuman pun terus meningkat pula. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menikmati makanan siap saji ini menyebabkan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru di bidang makanan dan minuman karena mereka menganggap sektor industri makanan dan minuman memiliki prospek yang menguntungkan baik masa sekarang maupun yang akan datang (Aidha, 2016)[1].

Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, yaitu mencari *profit*, akan tetapi selain mencari *profit* perusahaan juga mempunyai tujuan utama yakni adalah *going concern* yaitu dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham, karena harga saham saat ini mencerminkan penilaian investor terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Jika perusahaan mengambil keputusan yang buruk maka harga saham akan turun. Oleh karena itu, tujuan manajemen adalah mengambil keputusan yang bisa menaikkan harga saham, karena ini akan menghasilkan kekayaan bagi pemegang saham, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan (D’Onofrio, 2016)[2].

Nilai perusahaan dalam penelitian ini di ukur dengan *Price to Book Value (PBV)*, yang merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek perusahaan (Sagala, 2018)[3]. Berikut ini adalah grafik fenomena yang menggambarkan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018, sebagai berikut :



Gambar 1.1

Price to Book Value

Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa nilai perusahaan yang di proksikan dengan *Price book value (PBV)* pada tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuasi setiap tahun. Nilai *Price book value (PBV)* tertinggi dilakukan oleh PT. Siantar Top, Tbk (STTP) yakni senilai 4,61 pada tahun 2014, Artinya nilai perusahaan tersebut semakin baik. Sebaliknya nilai *Price book value (PBV)* terendah di ungkapkan oleh PT. Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2016 yang mengalami penurunan signifikan yakni sebesar 0,01. Hal ini menandakan bahwa adanya pengaruh nilai perusahaan bahwa *image* di perusahaan tersebut dimata investor tidak begitu baik sehingga mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yakni *Good Corporate Governance (GCG)* dan Ukuran perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good corporate governance (GCG)* merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya (Marini & Marina, 2019)[4].

Good Corporate Governance atau disebut juga tata kelola perusahaan yang baik menurut *Cadbury* yaitu prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (*shareholder*) khususnya pada pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya. Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, GCG merupakan cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab pada *stakeholder*-nya (Meylica, 2018)[5].

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia ((KNKG)., 2016)[6].

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu gambaran mengenai sistem tata kelola perusahaan yang baik dan merupakan salah satu kunci kesuksesan yang dimiliki perusahaan yang sedang berkembang serta dapat menguntungkan dalam jangka waktu yang lama. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu kunci perusahaan untuk tumbuh sekaligus menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan yang diharapkan melalui penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Tujuan ini dicapai melalui upaya perusahaan dalam memberikan kinerja yang maksimal, baik kinerja keuangan maupun kinerja usaha lainnya melalui aspek-aspek kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. (D’Onofrio, 2016)[2].

Berikut ini adalah contoh fenomena mengenai *Good corporate governance (GCG)* yakni perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), lembaga akuntan publik *Ernst & Young (EY)* sudah mengeluarkan audit soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. Namun terdapat beberapa poin penting yang dibebankan oleh EY dalam keterbukaan informasi yaitu terkait pembandingan antara data internal dengan Laporan Keuangan 2017 yang telah diaudit.

Poin-poin itu di antaranya yang pertama, terdapat dugaan *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup AISA. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (*disclosure*) secara memadai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. www.kontan.co.id [7]

Kasus tersebut menunjukkan bahwa proses akuntabilitas *good corporate governance (GCG)* tidak sesuai pada prinsipnya, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham serta bagaimana peran dari setiap pengawas yang dalam memastikan penyajian laporan keuangan harus dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi salah saji dalam pelaporan keuangan. Lemahnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi penyebab terjadinya pelanggaran manajemen yang berdampak pada nilai perusahaan industri makanan dan minuman akibat dari kinerja perusahaan yang kurang baik karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan para investor sehingga berdampak buruk terhadap pasar modal dan nilai perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan pada subsektor makanan dan minuman menjelaskan bahwa Penerapan tata kelola perusahaan atau *Good corporate governance (GCG)* di Indonesia saat ini masih terbilang rendah. Pada catatan tahun sebelumnya, terbukti dari 50 perusahaan besar di Asia Tenggara hanya ada 2 perusahaan yang berasal dari Indonesia yang bisa masuk kategori Top GCG, yaitu hanya dari sektor perbankan (CIMB Niaga dan Danamon), berbeda dengan negara Thailand yang memiliki 23 perusahaan yang masuk dalam Top GCG. www.kontan.co.id [7].

Lemahnya penerapan GCG dikarenakan kurangnya kesadaran akan suatu nilai dan praktek dasar dalam menjalankan bisnis, seharusnya dengan adanya penerapan GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai yang harus dijaga dan dipertahankan oleh suatu perusahaan dimana nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang

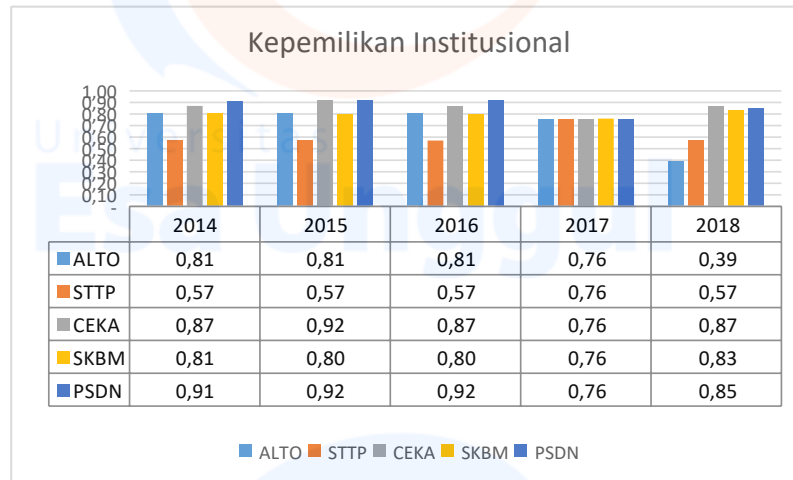
telah dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat diukur dengan nilai harga saham dipasar, berdasarkan terbentuknya harga saham di pasar yang merupakan refleksi dari penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara riil.

Good Corporate Governance di perlukan untuk mendorong pasar yang transparan, efisien, dan konsisten dengan peraturan perundang – undangan. Dalam menerapkan konsep *good corporate governance* untuk meningkatkan nilai perusahaan, *good corporate governance* memiliki prinsip TARIF yang mendasari yakni Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Perusahaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut karena bertujuan untuk memberikan pengaruh kemajuan yang baik terhadap nilai perusahaan. Apabila kinerja perusahaan stabil dan meningkat maka nilai perusahaan akan naik dimata para investor. Kelima komponen tersebut sangat berpengaruh terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat untuk membantu para investor, kreditor, calon investor, serta para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, analisis saham serta dapat menentukan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Untuk dapat mengatur sejauh mana system GCG tersebut dilaksanakan dengan baik, maka investor dapat melihat dari beberapa proksi *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen dan komite audit. Sehingga dari mekanisme tersebut digunakan untuk mengukur variabel GCG pada penelitian ini.

Prinsip *Good Corporate Governance* antara lain adalah *Transparency* (keterbukaan informasi). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER - 01/MBU/2011 [8], Transparansi adalah Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan serta antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu perusahaan. Transparansi memudahkan bagi masyarakat atau pemegang kepentingan untuk mencari informasi terkait kebijakan pemegang keputusan.

Transparansi pada penelitian ini di proksikan dengan Kepemilikan institusional yakni merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional sering disebut dengan investor yang canggih atau investor yang menggunakan jasa pialang, Investor yang canggih dan para pialang ini memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menilai perusahaan sehingga memberikan harga yang sesuai terhadap saham yang diperjual belikan. Manajemen perusahaan sebagai pengelola perusahaan akan berupaya meningkatkan kinerja mereka melalui berbagai keputusan guna meningkatkan nilai perusahaan.

(D’Onofrio, 2016)[2]. Berikut ini adalah Fenomena kepemilikan institusional yang ada di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (tahun 2014-2018 sebagai berikut :



Gambar 1.2
Kepemilikan Institusional

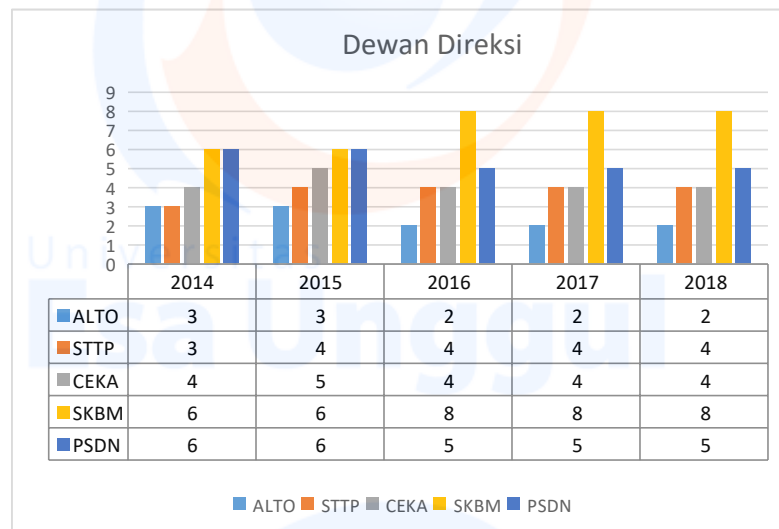
Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar di atas menjelaskan bahwa jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah kepemilikan institusional terendah di ungkapkan oleh PT. Tri Bayan Tirta Tbk pada tahun 2018 yakni sebesar 0,39. Sedangkan jumlah kepemilikan institusional tertinggi di ungkapkan oleh PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN) selama 2 kali berturut-turut yakni sebesar 0,92 pada tahun 2015 – 2017. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan institusional yang ada didalam perusahaan maka akan memperkuat adanya pengendalian perusahaan, sehingga dengan adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif dan dapat meningkatkan usaha pengawasan oleh pihak institusi untuk dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni yang di lakukan oleh (Nyoman, Muryati, & Suardikha, 2014)[9] Yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Alfian, 2017)[10] yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena kepemilikan institusional merupakan pemilik mayoritas perusahaan masih belum dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena para pemegang saham institusional hanya terfokus pada laba sekarang, jika laba sekarang dirasa kurang menguntungkan maka investor akan menarik investasinya.

Selain transparansi, pilar kedua dalam *good corporate governance* yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas adalah Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan((KNKG)., 2016)[6].

Akuntabilitas pada penelitian ini di proksikan dengan Dewan direksi. Dewan direksi yakni berperan sebagai agent dalam suatu perusahaan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka manajer mempunyai kemungkinan untuk tidak bertindak bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan. (FCGI, 2011)[11]. Dengan adanya akuntabilitas maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan lebih ketat sehingga mencegah sikap oportunistik manajer sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berikut ini adalah Fenomena dewan direksi yang ada di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (tahun 2014-2018 sebagai berikut :



Gambar 1.3

Jumlah Dewan Direksi

Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.3 di atas menjelaskan bahwa keadaan anggota dewan direksi pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah anggota dewan direksi terendah di ungkapkan oleh PT. Tri Bayan Tirta Tbk pada tahun 2016 – 2018 yakni sejumlah 2 anggota

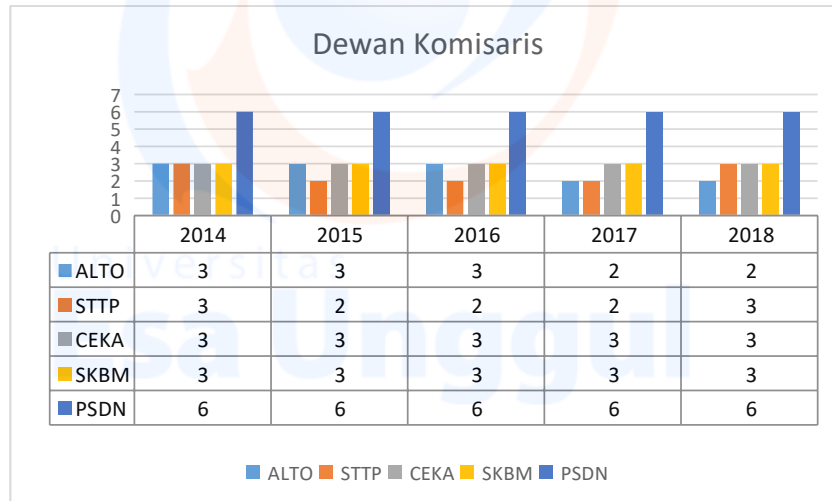
dewan direksi. Sedangkan jumlah anggota dewan direksi tertinggi di ungkapkan oleh PT. Sekar Bumi Tbk pada tahun 2016 – 2018 yakni sejumlah 8 orang anggota dewan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan direksi maka akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena dapat memberikan jaringan yang luas dan meningkatkan kepercayaan bagi para investor sehingga akan tercipta pencapaian komunikasi yang efektif antar anggota dewan direksi yang dapat meningkatkan profitabilitas yang baik sehingga akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dimana itu artinya nilai perusahaan juga akan meningkat.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni yang di lakukan oleh (Marini & Marina, 2019)[4] Yang menjelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Obradovich dan Gill 2013)[12] yang menjelaskan bahwa dewan direksi berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. pada penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang besar berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Ukuran dewan direksi yang kecil dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan sebab ukuran dewan direksi yang besar tidak efektif dalam komunikasi dalam dewan dan mengambil keputusan dalam manajemen sehingga akan berdampak terhadap nilai perusahaan.

Faktor ke tiga yang mempengaruhi nilai perusahaan selain dari transparansi dan akuntabilitas yaitu *Responsibilitas (Responsibility)* merupakan perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Responsibilitas pada penelitian ini di proksikan menggunakan variabel dewan komisaris yang merupakan bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. ((KNKG), 2016)[6].

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya yaitu komite audit. (Marini & Marina, 2019)[4]. Berikut ini adalah Fenomena komisaris independen yang ada di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (tahun 2014-2018 sebagai berikut :



Gambar 1.4
Jumlah Dewan Komisaris

Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.4 di atas menjelaskan bahwa keadaan anggota dewan komisaris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah anggota dewan komisaris terendah di ungkapkan oleh PT. Tri bayan tirta, Tbk (ALTO) yakni beranggotakan sejumlah 2 orang pada tahun 2017 – 2018. Sedangkan jumlah dewan komisaris tertinggi sejumlah 6 orang di ungkapkan oleh PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN).

Semakin banyak anggota dewan komisaris maka akan semakin baik tingkat independensi dan tanggung jawabnya terhadap perusahaan, sehingga akan membuat nilai perusahaan lebih baik di mata investor dibandingkan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Menurut (Abbasi et al, 2012)[13] semakin besar proporsi dewan independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan semakin objektif. Pengambilan keputusan yang objektif ini dapat mempengaruhi harga saham perusahaan sehingga berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan.

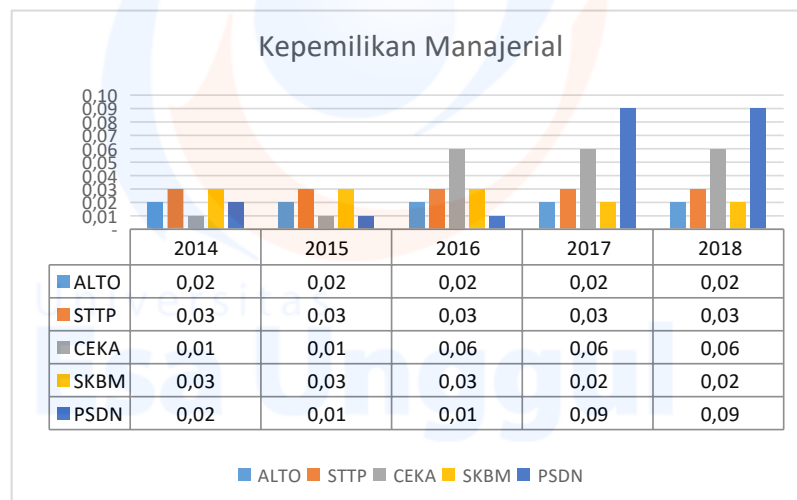
Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni yang di lakukan oleh (Studi, Universitas, & Batam, 2016)[14] Yang menjelaskan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Alfian,2017)[15] yang menjelaskan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan hasil bahwa Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka akan semakin rendah nilai perusahaan, karena terlalu banyak dewan komisaris maka pengambilan keputusan tidak efektif sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Faktor ke Empat yang mempengaruhi nilai perusahaan selain dari transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas yakni independen (*Independency*). Untuk memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara

independen dengan keseimbangan kekuatan. Dalam keseimbangan kekuatan tersebut, tidak ada organ perusahaan yang mendominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi dari pihak lain.

Independensi pada penelitian ini di proksikan dengan variabel Kepemilikan Manajerial (*managerial ownership*) adalah Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. (Mutmainah, 2015)[16].

Kaitannya dengan nilai perusahaan yakni kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi sehingga dapat mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen guna meningkatkan nilai perusahaan. Berikut ini adalah fenomena kepemilikan manajerial pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.5
Jumlah Kepemilikan Manajerial
 Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.5 menjelaskan bahwa keadaan jumlah kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah kepemilikan majerial terendah di ungkapkan oleh PT. Tri Bayan Tirta Tbk yakni sebesar 0,02 selama 5 tahun berturut - turut pada tahun 2014 – 2018. Sedangkan jumlah kepemilikan

majerial tertinggi di ungkapkan oleh PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk pada tahun 2017- 2018 sebesar 0,09.

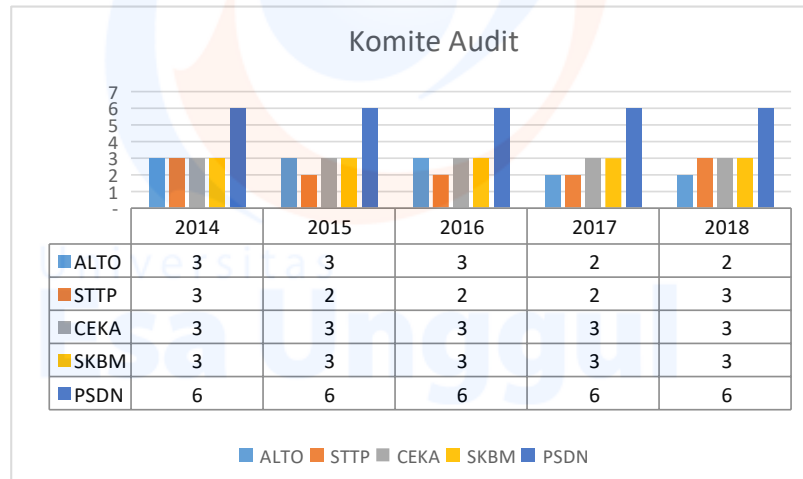
Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen di perusahaan, maka diharapkan manajemen tersebut termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan semakin tingginya kepemilikan manajerial di perusahaan, maka prospek perusahaan itu akan semakin baik. Sehingga akan menarik calon investor untuk menanamkan sahamnya ke perusahaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni yang di lakukan oleh (Muhammad Alvian, 2017)[10] Yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Sari, & Sanjaya, 2018)[17] yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Dengan Hasil bahwa Apabila jumlah dari kepemilikan pihak managerial rendah maka keuntungan bagi pihak manajerial pun tidak besar, sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja dan motivasi manajerial untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Faktor ke Lima yang mempengaruhi nilai perusahaan selain dari transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dan independen (*Independency*) adalah kesetaraan (*fairness*) mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Kesetaraan pada penelitian ini di proksikan dengan variabel Komite Audit yang tugasnya berkaitan dengan penelaah resiko yang di hadapi perusahaan serta ketaatan terhadap peraturan. Penggunaan komite audit merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya (Anggraeni, 2014)[18].

Kaitannya dengan nilai perusahaan yakni Komite audit secara efektif akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris untuk memperoleh kepercayaan dari pemegang saham. Dalam hal manipulasi data keuangan, komite audit memberikan kontribusi dalam membantu memeriksa data pada laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tersajinya informasi keuangan yang jelas dan transparan akan mengurangi informasi yang salah sehingga dapat menarik minat investor dan meningkatkan nilai perusahaan (Rouf, 2011)[19]. Berikut ini adalah Fenomena komite audit yang ada di perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (tahun 2014-2018 sebagai berikut :



Gambar 1.6

Jumlah Komite Audit

Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.6 menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif. Jumlah anggota komite audit terendah diungkapkan oleh PT. Tri banyan tirta, Tbk dengan jumlah komite audit sebanyak 2 orang anggota pada tahun 2017 – 2018. Sedangkan untuk jumlah komite audit tertinggi di ungkapkan oleh PT. Prasida niaga, Tbk yakni sebanyak 6 orang anggota komite audit di tahun 2014 – 2018.

Semakin banyak Kehadiran anggota komite audit yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan komisaris akan meningkatkan kualitas arus informasi antara pemegang saham dan manajer sehingga membantu mengurangi *agency problem* dan meningkatkan kepercayaan serta minat bagi para investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tugas pokok dari Komite Audit yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas fungsi audit. dengan begitu Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan membantu pelaksanaan GCG.

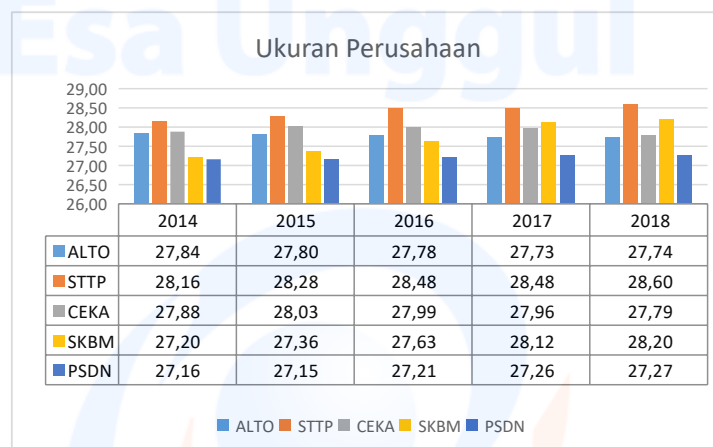
Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni yang di lakukan oleh (Isnawati, P, & P 2018))[20] Yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, Sari, & Sanjaya, 2018)[17] yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dengan hasil bahwa Komite audit di dalam perusahaan bertugas untuk mengawasi jalannya pembuatan laporan keuangan sehingga dapat menghindari kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun jumlah komite audit yang kurang signifikan dapat mengurangi efektifitas pengawasan. Kurang maksimalnya komite audit dalam

menjalankan tugasnya membuat kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan kurang maksimal sehingga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Variabel ke Enam yang mempengaruhi nilai perusahaan yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan (i gede wisnu paramadita, 2017)[21].

Ukuran Perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal (Anggraini, 2013)[22]. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena variabel tersebut dapat menentukan besarnya suatu perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya total aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas pada perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh.

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan Ln Total Asset, Asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan (Brigham & Weston, 2010 dalam Dhika Ermany 2018)[23]. Berikut ini adalah grafik ukuran perusahaan dengan proksi ln total asset pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :



Gambar 1.2

Ukuran perusahaan

Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan pada gambar 1.2 ukuran perusahaan yang di proksikan dengan Ln Asset pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Nilai ukuran perusahaan terendah di ungkapkan oleh PT. Prasida Aneka Niaga (PSDN) pada tahun 2015 yakni sebesar 27,15 akan tetapi *Price book value (PBV)* pada tahun tersebut cenderung mengalami kenaikan. Berarti walaupun adanya penurunan pada nilai ukuran tidak mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Namun sebaliknya nilai ukuran perusahaan yang di ungkapkan oleh PT. Siantar Top, Tbk (STTP) pada tahun 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni sebesar 27,27. Akan tetapi jika dihubungkan dengan *Price book value (PBV)* pada tahun 2018 perusahaan tersebut cenderung mengalami kenaikan hal ini menandakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positive terhadap nilai perusahaan karena Semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak bagi para investor yang menaruh perhatian untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni yang di lakukan oleh (Angga Pratama & Wiksuana, 2018)[24] Yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap positif terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriyani, 2017)[25] yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dengan proksi Ln asset berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan.

Alasan memilih perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman terkait *Good corporate Governance (GCG)* adalah karena dalam perusahaan makanan dan minuman memiliki skala besar sehingga cangkupan pengendalian didalam perusahaan tersebut semakin banyak dan dapat menyebabkan kurangnya pengawasan oleh manajemen sehingga pengendalian pada perusahaan tersebut lemah, Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik dan juga adanya fenomena fluktuatif pada nilai perusahaan subsektor makanan dan minuman yang di ukur menggunakan *price book value (PBV)* sedangkan perusahaan makanan dan minuman ini sangat di butuhkan oleh para konsumen terutama masyarakat di Indonesia karena terdapat kebutuhan pokok di dalamnya sehingga menjadikan perusahaan makanan dan minuman memiliki prospek harga saham dimasa mendatang untuk memberikan pengaruh kontribusi yang baik terhadap nilai perusahaan.

Motivasi penelitian ini adalah untuk melanjutkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten karena pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan agar pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Karena bagi pemegang saham, GCG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan *returns* yang memadai serta untuk mengetahui kebermanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan berinvestasi dan juga menjalankan pengawasan yang bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan terutama yang dilakukan dengan mekanisme *corporate governance* dengan harapan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Serta perhitungan penciptaan saham baru yang mana semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah jika ingin menambah modal.

Berdasarkan fenomena pajak dan penelitian yang terjadi diatas, maka perlu dilakukan penelitian kembali terhadap pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* dan ukuran perusahaan terhadap Nilai Perusahaan yang di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori maupun penelitian sebelumnya dan sebaliknya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* dan Ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018 ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Pergerakan rata-rata *Price to Book Value* (PBV) periode 2014-2018 mengalami fluktuasi, hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman cenderung mengalami fluktuatif.
2. Adanya pelanggaran kasus *good corporate governance* pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang mengakibatkan turunnya harga pasar modal dan berakibat pada nilai perusahaan.
3. Mekanisme *Good Corporate Governance* antara lain kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit cenderung mengalami fluktuatif setiap tahunnya.
4. Ukuran perusahaan yang di ukur dengan Ln Asset pada manufaktur subsektor makanan dan minuman mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Namun nilai perusahaan tidak selalu menunjukkan kenaikan melainkan fluktuatif

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Penelitian hanya akan membahas variabel pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang di ukur dengan Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan di ukur menggunakan Ln Asset sebagai variabel independen serta Nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang di ukur dengan menggunakan rumus *Price book value* (PBV).
2. Industri yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode 2014-2018 perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di buat rumusan masalah yang ada pada penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan Ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018 ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018?

3. Apakah Dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018?
4. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018 ?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018 ?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018 ?
7. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pembuatan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governanve (GCG)* yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, komisaris independen, komite audit *dan* Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2014 – 2018.
2. Untuk menganalisis adakah pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018.
3. Untuk menganalisis adakah pengaruh Dewan direksi secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018.
4. Untuk menganalisis adakah pengaruh Dewan komisaris secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018.
5. Untuk menganalisis adakah pengaruh Kepemilikan Manajerial secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018.
6. Untuk menganalisis adakah pengaruh komite audit secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018.

7. Untuk menganalisis adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dan solusi terkait dengan permasalahan mengenai *good corporate governance*, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang. Meningkatnya kinerja manajemen akan menarik para calon investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut dengan asumsi bahwa semakin bagus kinerja manajemen maka semakin handal informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan tersebut serta total aset dalam suatu perusahaan menunjukkan hasil kinerja dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan lebih terbuka dalam penyampaian informasi kepada investor mengenai kinerja perusahaan dan mengurangi tindakan – tindakan yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

2. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat akan melakukan investasi sehingga pada saat calon investor mengetahui informasi mengenai mekanisme *good corporate governance*, dan ukuran perusahaan pada suatu perusahaan maka calon investor tersebut dapat menentukan apakah akan melakukan investasi atau tidak pada perusahaan tersebut dengan pertimbangan faktor yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan yang terkait dengan pengambilan keputusan di dalam investasi sehingga investor dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian mendatang terutama penelitian yang terkait dengan *good corporate governance*, profitabilitas, ukuran perusahaan maupun nilai perusahaan.